

BAB II

2. Konsep dan Teori Penelitian

2.1 Konsep Kudeta

Menurut (Powell et al, 2011), definisi kudeta adalah “upaya ilegal dan terbuka oleh militer atau elite lain dalam aparaturnegara untuk menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat.” Dengan demikian, menurut definisi ini, hanya upaya untuk menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat dapat dianggap sebagai kudeta. Definisi tersebut juga memungkinkan terjadinya kudeta yang tidak didalangi oleh militer (yang dapat disebut sebagai kudeta militer), tetapi dilakukan oleh elite mana pun yang merupakan bagian dari hierarki negara. Mampu atau tidaknya dalang kudeta untuk mempertahankan kekuasaan mereka setidaknya selama tujuh hari sering digunakan untuk membedakan kudeta yang berhasil dan yang gagal.

Dengan berakhirnya absolutisme dan penetapan prinsip kedaulatan rakyat di abad ke-17, yang memisahkan penguasa dari negara, konsep kudeta berubah menjadi seperti yang dikenal sekarang (Bartelson, 1997). Salah satu definisi klasik dikemukakan oleh Luttwak yang mendefinisikan kudeta sebagai “penyusupan segmen kecil tapi kritis dari aparaturnegara yang digunakan untuk menggulingkan pemerintah dari kendali yang tersisa” (Luttwak, 1969: 12).

Kudeta pada dasarnya bukanlah konsep yang diperdebatkan seperti halnya demokrasi atau populisme (Gallie, 1956; Mudde, 2004). Meskipun terdapat ketidaksepakatan, ada konsensus akademis yang relatif luas tentang apa yang dimaksud dengan kudeta. Namun, istilah tersebut banyak digunakan di luar akademisi dan kontroversial karena sarat politik dan memiliki implikasi normatif dan praktis. Amerika Serikat pasti akan menanggukhkan program bantuan asing jika negara penerima mengalami kudeta dan

Uni Eropa (UE) menjunjung ketentuan serupa (Marinov dan Goemans, 2014: 805). Selain itu, seorang kepala negara yang terancam kekuasaannya memiliki kecenderungan untuk menggolongkan lawannya sebagai pelaku kudeta, sementara pihak oposisi ingin menyamar sebagai pejuang kebebasan dan demokrasi untuk menentang kepala negara yang berpikiran otoriter atau tidak demokratis. Demikian pula, pelaku kudeta sering mencoba untuk membenarkan tindakan mereka sebagai “revolusi”, serta mengakui diri mereka sebagai “gerakan” (Wardlaw, 1989).

Terjadinya sebuah kudeta hampir tak terhindarkan berkaitan dengan perdebatan sengit tentang konsekuensinya bagi perkembangan politik masa depan di negara masing-masing. Salah satu contoh kudeta di masa modern adalah kudeta militer Mesir yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah el-Sisi yang menggulingkan presiden pertama yang terpilih secara demokratis pasca-Musim Semi Arab, Mohamed Morsi, pada tahun 2013. Banyak pengamat setuju bahwa kudeta tersebut secara mendasar mengubah haluan perkembangan politik Mesir. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa para ilmuwan politik dan ekonom pada tingkat yang lebih rendah sangat tertarik dalam mengkaji penyebab dan dampak kudeta dan telah mempelajarinya selama beberapa dekade.

Selain kekacauan politik yang mereka timbulkan, kudeta juga memiliki konsekuensi negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini pertama kali ditunjukkan secara empiris oleh (Barro, 1991). (Levine et al, 1992) mengonfirmasi dampak buruk kudeta terhadap investasi, sementara (Sala-iMartin, 1997) menguatkan dampak buruknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut (Alesina et al, 1996), kudeta tidak hanya mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mungkin disebabkan oleh situasi ekonomi yang buruk di suatu negara. (Leon, 2014) menunjukkan bahwa kudeta, khususnya yang berhasil,

menyebabkan peningkatan pengeluaran dalam sektor pertahanan. Kudeta yang berhasil mengarah pada institusi demokrasi yang lebih buruk dan kekerasan yang lebih parah.

Akibat kudeta militer 2021, pertumbuhan dan produktivitas faktor-faktor produksi (modal manusia dan fisik) yang menjadi tulang punggung negara Myanmar berkurang, sehingga mengurangi pengembalian investasi atas modal ekonomi. Lebih jauh, efek destruktif dari kudeta militer menaikkan tingkat depresiasi modal di negara Asia Tenggara tersebut.

Banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan, kekurangan arus kas, dan kesulitan dalam mengakses layanan perbankan dan internet, yang merugikan tenaga kerja dalam perekonomian di mana dampak gabungan dari kudeta dan pandemi Covid-19 merugikan Myanmar sekitar 1,6 juta pekerjaan pada tahun 2021. Sektor konstruksi, garmen, pariwisata, dan perhotelan mengalami kehilangan pekerjaan dari tahun ke tahun masing-masing sebesar 31 persen, 27 persen, dan 30 persen.

Pada September 2021, perekonomian Myanmar mengalami kontraksi sebesar 18 persen dan sejak itu proyeksi pertumbuhannya hanya sekitar 1 persen. Krisis politik pasca-kudeta 2021 menghancurkan iklim bisnis dan menurunkan tingkat investasi langsung asing di Myanmar. Tidak hanya pendanaan proyek infrastruktur dari negara-negara donor, seperti bantuan pembangunan resmi dari Jepang yang dipertaruhkan; banyak bisnis internasional, seperti perusahaan telekomunikasi Telenor asal Norwegia, mempertimbangkan kembali investasi mereka di Myanmar (Banerjee, 2022).

Terlepas dari gejolak politik Myanmar, proyek-proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok tetap berjalan dengan jaminan junta militer penguasa yang baru, yaitu *State Administration Council* (SAC). Pada Februari 2021, *China Power* memulai pembangunan proyek pembangkit listrik siklus gabungan gas-uap Kyaukpyu.

Proyek senilai \$180 juta ini akan berkontribusi pada pengoperasian pelabuhan laut dalam dan SEZ. Selain itu, junta mengganti komite KEK Kyaukpyu dengan anggota baru untuk melaksanakan proyeknya. Pada Maret 2021, proyek pembangkit listrik tenaga gas alam Mee Lin Gyaing dari Grup Investasi Energi Provinsi Yunnan di wilayah Ayeyarwady, senilai \$2,5 miliar, disetujui oleh pemerintah SAC. Proyek BRI lainnya sedang berjalan dalam persiapan (Chan, 2021).

2.2 Regionalisme

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah regionalisme. (Winters, 1999) mendefinisikan regionalisme sebagai ‘setiap kebijakan yang dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan antara beberapa negara, terlepas dari apakah negara-negara tersebut benar-benar berdekatan atau bahkan dekat satu sama lain.’ Kecenderungan untuk menyebut kawasan sebagai ‘blok perdagangan’ terlalu menekankan aspek perdagangan dari regionalisme dan kata ‘blok’ menyiratkan sifat defensif (Cable et al, 1994). Karena kurang lebih baik, sebagian besar penulis mendefinisikan suatu kawasan dalam hal kedekatan geografis (Mansfield et al, 1997). (Cohen, 1997), di sisi lain, menekankan mata uang bersama sebagai dasar regionalisme. Regionalisme dapat merujuk secara longgar pada semakin banyaknya hubungan integrasi dengan intensitas yang berbeda-beda antara setiap negara-bangsa (Dent, 1997), tetapi paling baik dicontohkan dengan meningkatnya jumlah perjanjian integrasi regional (RIA) baru di seluruh dunia selama tahun 1990-an (Atkinson, 1999).

Upaya yang lebih baru untuk mencapai integrasi regional dimulai pada tahun 1960-an, ketika banyak negara berkembang mencoba mengambil keuntungan dari keunggulan komparatif dan pasar yang lebih besar sambil melindungi pasar mereka dari

perdagangan global melalui industrialisasi substitusi impor (ISI). Bentuk semi-autarki dari perdagangan bebas ini didasarkan pada pengurangan tarif yang terbatas pada sejumlah kecil produk, tingkat perlindungan yang tinggi terhadap negara ketiga, dan menawarkan sedikit ruang untuk keuntungan efisiensi melalui eksploitasi skala ekonomi (Laird, 1997). Ketika strategi ISI dapat dilihat dalam konteks pembagian dunia era Perang Dingin, gagasan ketergantungan Dunia Ketiga, dan kekhawatiran akan kebangkitan sentimen nasionalis, gelombang kedua menghasilkan lapisan kompleksitas tambahan pada fenomena regionalisme.

Akibatnya, ‘regionalisme baru’ ini (Mansfield et al, 2000) mendapat perhatian baru dari kalangan akademis. Meskipun ada banyak dan beragam literatur, ‘bagaimana dan mengapa’ tetap kurang dipahami (Hettne et al, 2000). Perdebatan berpusat pada keuntungan kesejahteraan dan implikasi regionalisme (terutama konsekuensi multilateralisme), dalam situasi apa suatu negara terlibat dalam Perjanjian Integrasi Regional (RIA), serta mengapa dan kapan integrasi mengambil bentuknya.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*), yang terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 dan pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap ancaman internal dan eksternal lingkungannya. Konteks lingkungan saat itu adalah terjadinya Perang Dingin yang dimulai dari tahun 1947 hingga sekitar tahun 1989 setelah berakhirnya Perang Dunia II, dimana hanya dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan militer global yang luas, sehingga “persaingan adikuasa” menjadi ciri utama politik global kala itu.

Faktor identitas regional tidak dapat dipisahkan dari visi membangun ASEAN mengingat perbedaan sejarah dan budaya

negara-negara ASEAN, selain nasib bersama yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, karena dapat memperkuat organisasi yang baru terbentuk saat itu. Hampir semua negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand. Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, Singapura dijajah oleh Inggris, Filipina dijajah oleh Spanyol, Brunei Darussalam dijajah oleh Inggris, Vietnam dijajah oleh Prancis, Kamboja dijajah oleh Prancis, Myanmar (Burma) dijajah oleh Inggris, dan Laos dijajah oleh Prancis. Mereka mendasari terbentuknya ASEAN atas rasa solidaritas dan perasaan yang sama karena bangsa Eropa menjajahnya. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok, lahirlah persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara di bawah bendera ASEAN.

Tanggapan ASEAN terhadap lingkungan spesifiknya tercermin dengan sangat jelas dalam tujuan utama Deklarasi Bangkok, yaitu memulihkan dan menyelaraskan kembali hubungan intra-regional dan menyusun struktur tatanan baru Asia Tenggara berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai, apa pun kondisi sistem sosial dan politik negara-negara anggotanya. Melalui struktur baru ini, ASEAN ingin meningkatkan kerja sama ekonomi dan sosial budaya: “mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan guna memperkuat landasan bagi kesejahteraan dan perdamaian masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara.” (Deklarasi Bangkok, 1967).

Meskipun dinyatakan bahwa tujuan ekonomi lebih menonjol daripada “memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan”, namun para pendiri ASEAN yakin bahwa ada ikatan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kerja sama di satu sisi dan perdamaian dan stabilitas di sisi lain. Premis dasar ASEAN ini telah dirumuskan sebagai sikap terpadu dalam ekonomi

serta kerja sama politik-keamanan dan hal ini secara khusus tercermin dalam sebagian besar dokumen ASEAN seperti Deklarasi Bangkok, Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN), dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

Dari tahun 1976 hingga 1989, koherensi dan *raison d'être* ASEAN dengan cepat bergeser ke perkembangan di semenanjung Indocina. Invasi dan pendudukan Vietnam ke Kamboja pada tahun 1979 selama sepuluh tahun merupakan katalitik dalam mengubah ASEAN. Organisasi tersebut berusaha untuk menahan ambisi Vietnam yang dirasakan dengan menggagalkan invasi dan pendudukannya di Kamboja. Dari tahun 1979 hingga 1982, ASEAN memimpin upaya diplomatik pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyangkal legitimasi politik Vietnam di Kamboja dengan secara diplomatik mendukung pemerintahan Demokratik Kampuchea (DK) yang digulingkan yang dipimpin oleh Khmer Merah. Ketika opini internasional menentang rezim DK atas tindakan genosida, ASEAN membangun koalisi Khmer yang diperluas dengan memasukkan pasukan nasionalis Son Sann dan pasukan royalis Norodom Sihanouk untuk membentuk Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kampuchea (CGDK). Rasionalisasi yang ditawarkan ASEAN untuk kebijakan ini adalah untuk menolak preseden Vietnam untuk mengatur kembali hubungan antar negara regional melalui penggunaan kekuatan dan untuk mencegah Thailand menjadi negara 'garis depan' komunisme melalui pendudukan Kamboja. Secara terpisah, Thailand, bersama dengan Tiongkok, mendirikan perkemahan perbatasan untuk CGDK di perbatasan Thailand-Kamboja untuk melawan pasukan pendudukan Vietnam. Bagi Thailand, kebijakan ini merupakan bagian dari keselarasan informal yang lebih luas dengan Tiongkok untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai penjamin eksternal untuk keamanannya. 'Ekspedisi hukuman' Tiongkok melawan Vietnam pada Februari 1979 adalah untuk meredakan kekhawatiran

keamanan Thailand dan juga untuk mendukung Khmer Merah. Cukuplah untuk mengatakan bahwa keterlibatan ASEAN dalam situasi Kamboja membawa koherensi organisasi dan visibilitas internasional yang jauh lebih besar. Sementara itu, Brunei bergabung dengan ASEAN pada tahun 1984 setelah Inggris mencabut status protektoratnya atas negara tersebut.

Pada saat situasi Kamboja diselesaikan oleh masyarakat internasional yang lebih luas yang pada gilirannya dipimpin oleh PBB, ASEAN merumuskan kembali agenda baru pada tahun 1990-an. Secara bersamaan, ia mengejar perluasan keanggotaan untuk mencakup semua negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal inisiatif politik, ASEAN awalnya meningkatkan status *Post-Ministerial Conference* (PMC) pada tahun 1992 dan kemudian meresmikan Forum Regional ASEAN (ARF) sebagai forum keamanan multilateral regional utama pada Juli 1994. Ini juga meningkatkan kolaborasi keamanan untuk menangani sejumlah masalah keamanan transnasional seperti perompakan, perdagangan narkoba ilegal, dan migrasi ilegal. Selain itu, ASEAN membentuk inti dalam Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang dibentuk pada tahun 1989. Dalam prakarsa ekonomi, APEC mendukung ‘segitiga pertumbuhan’ regional sebagai pendorong kerja sama intra-ASEAN dan pada tahun 1993, menandatangani pakta yang pada akhirnya akan mengarah pada Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 2008. Jadwal ini kemudian dikurangi sehingga akan berlaku pada tahun 2002.

Untuk memenuhi tujuannya dalam memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh kawasan, ASEAN menerima Vietnam ke dalam organisasi pada Juli 1995 dan Laos dan Burma/Myanmar pada Juli 1997. Pecahnya konflik domestik di Kamboja pada tahun 1997 antara pasukan Hun Sen dan Norodom Ranariddh berujung pada penundaan keanggotaan Kamboja. Kamboja kemudian bergabung pada April 1999. Perluasan keanggotaan ASEAN

mengubah kalibrasi dan pandangan organisasi karena sekarang memiliki tiga negara anggota dengan sistem partai tunggal (Vietnam, Laos, dan Kamboja) dan sebuah negara dengan junta militer yang berkuasa (Myanmar). Dimasukkannya negara otoriter militer sebenarnya bukanlah tanpa preseden, karena Indonesia, Filipina, dan Thailand semuanya memiliki pemerintahan seperti itu selama sejarah pendirian ASEAN. Namun bergabungnya Myanmar membawa serta perbedaan internal antara Filipina dan Thailand di satu sisi dan anggota yang tersisa di sisi lain, tentang cara terbaik menangani pendatang baru. Pertimbangan semacam itu setidaknya sebagian dipicu oleh kesulitan diplomatik yang dihadapi ASEAN dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa atas pendatang baru.

Prakarsa ASEAN telah memasukkan upaya untuk secara kolaboratif melibatkan negara-negara Asia Timur Laut melalui mekanisme yang dilembagakan dalam pengelompokan ASEAN + 3 yang mencakup Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Upaya pelembagaan lebih lanjut dan formal pengelompokan ini oleh Malaysia melalui lokasi sekretariat permanen di Kuala Lumpur telah gagal. Selain tekanan eksternal dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Barat-nya untuk membendung apa yang dianggap sebagai regionalisme eksklusif, ada juga kecemasan di dalam ASEAN. Indonesia yang menjadi tempat sekretariat ASEAN dan Singapura yang menjadi tempat sekretariat APEC tak mau kewalahan. Ada juga kecurigaan yang meluas bahwa entitas yang baru tersebut hanyalah sebuah reformulasi dari Pengelompokan Ekonomi Asia Timur (EAEG) yang kemudian diturunkan levelnya menjadi Kaukus Ekonomi Asia Timur (EAEC) dalam pembahasan ASEAN.

Ada sejumlah kekuatan internal yang menekan ASEAN dan evolusi serta agendanya. Salah satu kekuatan yang lebih serius adalah memudarnya kepemimpinan kolektif regional dan kelembagaan ASEAN setelah jatuhnya pemerintahan otoriter

Suharto pada Mei 1998. Kekuasaan Suharto di Indonesia jelas menstabilkan lingkungan regional dan kesediaan negara-negara anggota untuk memberikan status *primus inter pares* kepada Indonesia dalam ASEAN juga menahan ambisi hegemoni Indonesia di kawasan. Gejolak politik dan pergantian rezim yang cepat di Indonesia pasca-Suharto tidak menumbuhkan kondisi yang dibutuhkan untuk konsolidasi politik dalam negeri, apalagi kepemimpinan regional. Selama masa-masa yang lebih baik, Indonesia dapat mencoba menengahi kebuntuan Kamboja, meskipun tidak berhasil dengan *Jakarta Informal Meetings* (JIM) pada tahun 1988, berperan sebagai perantara yang jujur dalam mencoba menyelesaikan klaim teritorial Kepulauan Spratly yang disengketakan antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1990-an melalui dialog informal tahunan, dan menengahi gencatan senjata antara pemerintahan Ramos di Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) pada tahun 1996. Kepemimpinan regional seperti itu tidak ada lagi dan bisa dibilang ASEAN lebih lemah karenanya.